



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

Penyelenggaraan kewenangan bidang perhubungan di Kabupaten Tegal setelah berlakunya Undang-undang

No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah

ZAMZAMI, A, Prof.Dr. Muchsan, SH

Universitas Gadjah Mada, 2003. Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

IMPLIKASI RESTRUKTURISASI KANTOR PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TEGAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI  
DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 1999

A. Zam Zam<sup>1</sup>, Muchsan<sup>2</sup>, Enny Nurbaningsih<sup>3</sup>

Program Studi Magister Hukum Kenegaraan  
Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Intisari

Isu sentral dalam penelitian tesis ini, yaitu "Dampak Implementasi restrukturisasi kantor Perhubungan Kabupaten Tegal dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah", yang kemudian dituangkan dalam judul penelitian "Implikasi Restrukturisasi Kantor Perhubungan Kabupaten Tegal dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999", isu sentral tersebut mengandung berbagai permasalahan yakni permasalahan hukum empiris, yaitu bagaimanakah implementasi yang ditimbulkan dari restrukturisasi Kantor Perhubungan Kabupaten Tegal di era otonomi daerah ; permasalahan hukum normatif, yaitu apakah implementasi restrukturisasi tersebut mendukung pelaksanaan otonomi luas ; permasalahan hukum normatif pada lapisan teori hukum, yaitu dimanakah letak hambatan yuridisnya.

Metode penelitian yang digunakan merupakan kombinasi antara penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Tipe penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara wawancara dan observasi, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Tipe penelitian hukum normatif, bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan dapat menggunakan beberapa model antara lain pendekatan historis, komparatif, peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Masing-masing pendekatan digunakan sesuai kebutuhan.

Hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut : Tugas dan fungsi Kantor Perhubungan belum menggambarkan adanya perubahan sistem maupun perbaikan yang berarti dan relatif sama, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Implementasi konstitusi Kantor Perhubungan Kabupaten Tegal belum mendukung sepenuhnya prinsip otonomi luas, dikarenakan perubahan kelembagaan belum menyentuh pada aspek tugas dan fungsi secara keseluruhan, khususnya terhadap pelayanan pada masyarakat. Belum memadainya peraturan di tingkat daerah dalam mengejawantahkan perluasan kewenangan Kantor Perhubungan sehingga sebagian besar masih mengacu pada peraturan dari tingkat pusat. Dengan demikian perlu adanya pengaturan tersebut di Kabupaten Tegal dalam bentuk Peraturan Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Tegal : perlu membuat Peraturan Daerah tentang pelayanan di bidang perhubungan yang terintegrasi, perlu peningkatan anggaran, sarana operasional dan peningkatan SDM aparatur Kantor Perhubungan.

**Kata kunci :** Implementasi restrukturisasi Kantor Perhubungan Kabupaten Tegal dan pelaksanaan Otonomi Daerah.

<sup>1</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Hukum Universitas Darul Ulum, Jombang

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta



THE IMPLICATION OF RESTRUCTURIZATION IN  
TRANSPORTATION OFFICE OF TEGAL REGENCY IN APPLYING  
REGIONAL AUTONOMY ACCORDING TO REGULATION  
NUMBER 22, 1999

A. Zam Zami<sup>1</sup>, Muchsan<sup>2</sup>, Enny Nurbaningsih<sup>3</sup>

State Law Magister Study Program  
Post Graduate Program of Gadjah Mada University

**Abstract**

The main issue in this thesis is "the impact of restructurization implication of Transportation Office in applying Regional Autonomy in Tegal Regrecy". It is transformed into research title; The Implication of Restructurization in Transportation Office of Tegal Regency in Applying Regional Autonomy according to Regulation Number 22, 1999; This Issue consists of various problems such as empirical law problem, that is what implementation of restructurization in Transportation office of Tegal Regency in Regional Autonomy era; normative law problem, that is whether the restructurization implementation can support the application of broad autonomy; normative law problem in theoretical rank of law, that is to find the place of jurisdictional barrier.

Research methodology that is used here is a cinbination between empirical law research and normative law research. The type of empirical law research is applied by interview and observation method; the data are analyzed quantitatively. In the type of normative law research, the law materials that are gathered are analyzed by several approaches, like historical approach, comparative, law regulations and conceptual approach. Each approach is applied in accordance with the necessity.

The result of the research and its discussion are described as follow: the task and function of Transportation office describes neither the change of the system nor the improvement in it, compare to the time before the regulation number 22, 1999 is exist. Constitution implementation of transportation office of Tegal regency do not support broad autonomy's principle yet, because the institution's changes do not touch the aspect of task and function thoroughly, Es pecially for society service. The in sufficient of regional regulation in embodying the broaden of authority makes Transportation Office still refers to the central regulation. There fore, it is needed the arrangement of that matter in Tegal Regency in the form of regional regulation.

Based on the research, it is suggested to Tegal Regency Government to make regional regulations of integrated service in transportation and to raise the budget and operational instrument and to improve human resources of Transportation Office.

**Key Word:** Restructurization Implementation of Transportation Office of Tegal Regency; and Regional Autonomy application

<sup>1</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Hukum Universitas Darul Ulum, Jombang

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta